

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya perekonomian suatu negara khususnya Indonesia, mengakibatkan permintaan akan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga meningkat, baik pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Untuk meminimalisir hal tersebut dibutuhkan suatu lembaga atau perusahaan.

Indonesia memiliki lebih dari satu lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan itu adalah Bank. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹ Pembiayaan tersebut merupakan salah satu kegiatan bank syariah yang berperan penting dalam perputaran modal yang dimiliki Bank. Karena pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan Bank. Sehingga apabila pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah (rakyat) mengalami kemacetan maka akan pada berkembangnya sebagian besar dari pendapatan Bank. Dengan demikian salah satu cara untuk mendorong sebuah pergerakan

¹ Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 758-759

perekonomian yang progresif di dalam suatu bangsa yaitu dengan dilakukannya pembiayaan produktif.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun makro. Sesuai dengan fungsinya, perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit*).² Melalui perbankan kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Perubahan dan kemajuan dunia perbankan diikuti dengan perubahan peraturan yang tentunya memberikan dampak, salah satu perubahan regulasi tersebut adalah UU No. 7 Tahun 1992. Sebelum perubahan tersebut terbentuk bank dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan usahanya, antara lain bank pembangunan, bank tabungan, dan bank ekspor impor. Menurut UU tersebut bank yang mendapatkan pengakuan secara resmi adalah BPR dan Bank Umum.³

Berdasarkan UU No 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup

² Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006) hlm 153

³ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Perbankan & Undang-undang Lembaga Perjanjian Simpanan*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2005), hlm. 4

masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Pada perkembangan saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki tantangan yang besar yaitu tingkat persaingan yang tinggi dan kemampuan pengendalian risiko terutama risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sejangkau ini risiko pembiayaan dikenal sebagai risiko terbesar yang dihadapi bank. Risiko ini tidak terhindarkan karena risiko tersebut melekat pada kegiatan utama yang dijalankan bank yaitu menyalurkan dana. Risiko ini menjadi risiko terbesar karena kerugian akibat pembiayaan macet dapat berpotensi menghancurkan permodalan bank. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan macet suatu bank.

Terjadinya krisis keuangan global dapat mempengaruhi tingkat perekonomian di seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Karena dengan adanya krisis keuangan tersebut juga dapat menyebabkan nilai suku bunga pinjaman yang diberikan Bank kepada nasabah atau masyarakat akan meningkat. Sehingga nasabah akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman. Oleh sebab itu, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu masalah bagi perbankan. Telah terbukti bahwa penyebab ekonomi yang melemah yaitu kinerja perbankan yang tidak baik. Khususnya pada tingginya

⁴ Ibid, hlm. 4

pembiayaan bermasalah, dengan demikian akan berkontribusi cukup besar pada hasil kinerja suatu bank.

Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah juga merupakan salah satu cara yang sangat penting, karena hal tersebut dapat dipakai sebagai salah satu referensi bagi bank dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil kedepannya dalam menjalankan manajemen resiko pembiayaan. Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkaitan langsung dengan standar pemberian pembiayaan yang lunak atau longgar, manajemen risiko portofolio pembiayaan yang lemah, dan karena kurang perhatian terhadap perubahan ekonomi atau kondisi lingkungan lainnya.⁵

Pengalaman Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena adanya pembiayaan bermasalah dapat memicu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana pembiayaan. Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara meneliti penyebab pembiayaan bermasalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam memberikan pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti dapat membahayakan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut. Rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisa atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengaman pembiayaan lebih diperhatikan, dan peningkatan sistem pembinaan nasabah. Semua hal tersebut untuk meningkatkan

⁵ Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hlm.111

pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat sehingga dari semua yang dilakukan akan dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

Dalam Islam dijelaskan untuk mengajarkan kita berbuat baik dengan sesama dan bersikap tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti pada Q.S Al-maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب...

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah:2)⁶

Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diserahkan untuk bersikap saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, baik dalam hal agama maupun kehidupan sehari-hari ataupun dunia. Hal tersebut selaras dengan pemberian pembiayaan kepada orang yang sedang membutuhkan dengan tujuan kebaikan. Pemberian pembiayaan dapat dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah kepada anggota yang sedang membutuhkan dan telah memenuhi prosedur.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2007), hlm.106

Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangan sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan. Faktor eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kejadian moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara. Secara dimensi internal, NPF perbankan syariah dapat dianalisis dengan pencapaian yang telah diraih dengan melihat rasio keuntungan berdasarkan.⁷

Faktor internal yang dapat mempengaruhi nilai pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung rasio (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber lain. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.⁸ Makin tinggi CAR (*Capital Adequacy Ratio*), makin rendah terjadinya pihak bank untuk menyalah gunakan

⁷ Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*.....hlm. 394.

⁸ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.121

pembiayaan yang dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah.⁹ Berikut adalah grafik CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2014-2018.

Grafik 1.1

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan¹⁰

Berdasarkan grafik 1.1 diatas menggambarkan besaran CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2014-2018. Dalam grafik tersebut menggambarkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dalam setiap tahun. Dari tahun ke tahun CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia mengalami perubahan. Kenaikan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terjadi pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 26%, dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 148%.

Faktor internal selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai pembiayaan bermasalah adalah FDR (*Financing to Deposit Ratio*), FDR dapat dilihat dari tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas dapat menjadi salah satu penyebab

⁹ Rizal Nur Firdaus, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *El-Dinar*, Vol. 3, No. 1, Januari 2015.

¹⁰ www.ojk.go.id

pembiayaan bermasalah. Jika kondisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) likuid maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan lebih cepat untuk menurunkan pembiayaan walaupun tingkat kemacetan sedang mengalami kenaikan.¹¹ Semakin tinggi rasio FDR, maka semakin tidak likuid Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut karena seluruh dana yang dimiliki digunakan untuk pembiayaan. Jadi semakin tinggi rasio FDR kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi.¹² Berikut adalah grafik FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada BPRS di Indonesia tahun 2014-2018.

Grafik 1.2

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan¹³

Berdasarkan grafik 1.2 FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada selalu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014-2017 FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BPRS selalu mengalami penurunan. penurunan

¹¹ Siamat D, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 2005

¹² Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*.....hlm. 784-785

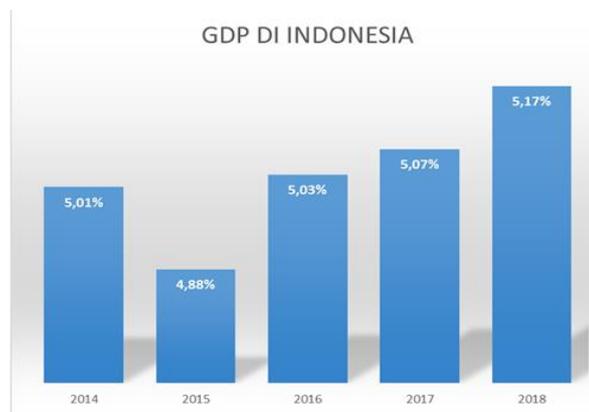
¹³ www.ojk.go.id

terbesar terjadi pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 5,66%. Kenaikan besaran FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 0,55%.

Selain faktor internal tersebut, pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Diantara faktor eksternal tersebut adalah GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Komponen dalam GDP (*Gross Domestic Product*) antara lain adalah pendapatan, pengeluaran atau investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih antara ekspor import. Ketika GDP (*Gross Domestic Product*) meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis meningkat sehingga NPF mengalami penurunan.¹⁴ Berikut ini adalah grafik GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia tahun 2014-2018.

Grafik 1.3

GDP (*Gross Domestic Product*) di Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik¹⁵

Grafik 1.3 diatas memaparkan angka GDP di Indonesia dalam persen tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 GDP sebesar 5,01% kemusian mengalami

¹⁴ Nasution, E., Mustafa, dan Wiliansih, "Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran DPK Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol VIII, No.02105-129. 2007

¹⁵ www.bps.go.id

penurunan pada tahun 2015 pada tahun ini GDP sebesar 4,88%. Ditahun 2016 GDP meningkat sehingga besar GDP pada tahun 2016 sebesar 5,03%. Pada tahun 2017 sebesar 5,07% dan pada tahun 2018 sebesar 5,17%.

Faktor eksternal yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlanhgsung secara terus menerus dari waktu ke waktu.¹⁶ Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah karena bila inflasi naik juga menaikkan NPF.¹⁷ Kedua faktor eksternal tersebut dinilai dapat mempengaruhi pembiayaan bermaslaah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut adalah grafik tingkat inflasi di Indonesia tahun 2014-2018.

Grafik 1.4
Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Laporan Inflasi Indonesia¹⁸

Berdarkan grafik 1.4 berikut besar inflasi pada tahun 2014 adalah 8,36%, tahun 2015 sebesar 3,35%, tahun 2016 inflasi sebesar 3,02%, tahun 2017 inflasi mencapai 3,61% dan pada tahun 2018 sebesar 3,13%. Semakin tinggi angka

¹⁶ Sri Wahyuni Asnani, "Faktor-faktor yang Mempenhgaruhi Non Perfoming Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal TEKUN/Volume V, No. 02, September 2014:264-280*

¹⁷ I. Firmansyah, "Determinant of Non Perfoming Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia.", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 17(2)*, 241-258

¹⁸ www.bps.go.id

inflasi menyebabkan beban hidup semakin tinggi pula. Hal itu menyebabkan biaya konsumsi akan semakin meningkat dan pendapatan riil akan menurun sehingga mengakibatkan masyarakat akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh perbankan.

Tingginya nilai pembiayaan bermasalah atau NPF menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio NPF tinggi maka sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk rasio NPF memenuhi rasio NPF sesuai dengan ketentuan dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pemerintah yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan memanggil setiap bank yang memiliki rasio NPF yang tinggi. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga rasio NPF setiap bank tidak melebihi 5%.

Dalam skala mikro keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian disektor riil, hal ini tidak terlepas dari peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam meningkatkan pertumbuhan Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan obyek pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai dengan Desember 2018 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki jaringan kantor sebanyak 167 yang hampir tersebar di seluruh penjuru nusantara. Total aset BPRS selama tahun 2013 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 111.909% menjadi Rp12.361,734 triliun atau meningkat 18.65% setiap

tahunnya. Pada periode yang sama peningkatan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga diikuti oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang meningkat masing-masing 71,008% dan 51,837% atau meningkat 11,834% dan 8,639% setiap tahunnya.¹⁹ Berikut adalah grafik pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2014-2018.

Grafik 1.5
Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan grafik 1.5 diatas menggambarkan besaran pembiayaan bermasalah tahun 2014 sampai dengan 2018. Dalam grafik tersebut menggambarkan pembiayaan bermasalah setiap tahun. Dalam setiap tahunnya pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia mengalami perubahan dari tahun 2014 hingga 2017 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun

¹⁹ www.ojk.go.id

2016-2017, dimana pembiayaan bermasalah pada tahun 2016 sebesar 8,63% meningkat menjadi 9,68% pada tahun 2017. Akibat dari besarnya pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan dengan baik.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini penting dilakukan karena nantinya dapat dipakai sebagai salah satu referensi bagi pihak bank sebagai pelaku maupun bagi pemerintah atau Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembuat atau merumuskan kebijakan tentang perbankan.

Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) prosesnya mudah sehingga membuat masyarakat lebih senang untuk melakukan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun prosentase bagi hasil pada Bank Rakyat Syariah lebih besar jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Banyaknya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yang tinggi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Beberapa hal itu menjadikan suatu kajian yang membutuhkan analisa penyebabnya karena kegiatan operasional utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah memberikan pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sehingga permasalahan dalam pembiayaan harus dengan tepat di analisis. Hal tersebut adalah alasan peneliti mengambil judul **“DETERMINASI FAKTOR YANG**

MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada periode Tahun 2014-2018.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara FDR terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara GDP terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh CAR, FDR, GDP, inflasi secara bersama sama terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini disusun untuk mencapai berbagai tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh CAR terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF pada BPRS di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh FDR terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF pada BPRS di Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh GDP terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF pada BPRS di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF pada BPRS di Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh CAR, FDR, GDP, inflasi secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF pada BPRS di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai determinasi faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah khususnya BPRS.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi mahasiswa khususnya perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti besar harapannya digunakan untuk referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, agar masalah yang diteliti bisa fokus dan tidak meluas. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup diantaranya adalah CAR, FDR, GDP, dan Inflasi difokuskan pada BPRS yang ada di Indonesia

yang dapat ditemukan pada laporan keuangan BPRS yang dapat diakses di website resmi OJK dan data GDP serta inflasi dari BPS.

2. Keterbatasan Penelitian

Dengan rumusan masalah seperti yang tertera diatas, masalah dari penelitian ini perlu dibatasi agar berjalan terarah dan focus. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel dependen penelitian ini sangat terbatas yaitu variabel NPF pada BPRS di Indonesia sedangkan variabel independen dibatasi oleh variabel CAR, FDR, GDP dan inflasi.
- b. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah data statistic perbankan syariah, data GDP dari badan pusat statistic, serta data tingkat inflasi dari Bank Indonesia.
- c. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2014-2018.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Dalam artian luas CAR adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko

kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal.²⁰

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.²¹

c. *Gross Domestic Bruto* (GDP)

Gross Domestic Bruto (GDP) merupakan nilai barang atau jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara negara tersebut dan negara asing. GDP merefleksikan kegiatan penduduk di suatu negara dalam memproduksi suatu barang dalam kurun waktu tertentu.²²

d. Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi.²³

e. *Pembiayaan Bermasalah* (NPF)

²⁰ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*,hlm. 161

²¹ Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*,hlm. 394

²² Mankiw, N. G, *Macroeconomics 6th Edition*. Terjemahan oleh Wibi Hardani, Devri Barnadi & Suryadi Saat, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.9

²³ Imammudin Yuliani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 74

Pembiayaan macet atau NPF adalah pembiayaan tidak lancar atau pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.²⁴

2. Definisi Operasional

Beberapa faktor internal seperti CAR yang dapat dilihat dari odal atau aktiva tertimbang menurut risiko, FDR atau perbandingan pembiayaan dinilai dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Selain faktor internal, pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti GDP (total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama satu tahun.) dan inflasi (kondisi dimana harga umum pada perekonomian mengalami peningkatan dalam waktu terus menerus). Beberapa faktor tersebut dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau NPF yaitu pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dilaporkan dan disajikan secara terperinci dalam enam bab yang setiap babnya terdapat masing-masing sub bab. Sebagai perincian dalam enam bab tersebut maka sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

²⁴ A. Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.447

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lambiran, dan abstrak.

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan terkait diskripsi teori, (teori yang membahas judul), penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri penulis menguraikan mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

6. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.